Go To English Page

Nomor Surat	08/CS/KMI/IV/2026
Nama Perusahaan	KMI Wire and Cable Tbk
Kode Emiten	KBLI
Lampiran	1
Perihal	Penyampaian Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan ESG

Perseroan Menyampaikan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan ESG tahun 2025 dengan periode tahun buku dari 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dalam bahasa Indonesia

Apakah Perseroan akan/telah melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan? (Ya)

Perseroan melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 10 Juni 2025

Informasi sebagaimana dimaksud di atas telah dimuat pada Situs Web Perseroan di alamat link https://kmi.co.id/index.php/investor/disclosure pada tanggal 19 Mei 2025

Apakah Perseroan tercatat di Bursa lain? (Tidak)

A. Kinerja Lingkungan (Environmental Performance)

Perseroan menyampaikan Keberlanjutan dan ESG Tahunan :

E-01 Laporan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	
Laporan Emisi GRK Konsolidasi?	Ya
Batasan Organisasi	Operasional/Finansial
Adakah anak perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam laporan ini?	Ya
Mohon Jelaskan: PT KMI Electric Solution & PT Langgeng Bajapratama	

Name	Total Emisi (tCO2e)
Kategori 1: Emisi GRK langsung dan pembuangan	
Emisi langsung dari pembakaran stasioner	0
Emisi langsung dari pembakaran bergerak	1.912,8
Emisi langsung dari proses pengolahan	0
Emisi fugitive langsung	0
Emisi langsung dari Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)	0
Total Emisi Langsung (Scope 1)	1.912,8

Kategori 2: Emisi GRK tidak langsung dari energi yang diimpor/dibeli	
Emisi tidak langsung dari konsumsi Listrik yang diimpor/dibeli	21.338,7
Emisi tidak langsung dari konsumsi jaringan energi yang diimpor/dibeli (diluar listrik)	0
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 2)	21.338,7
Kategori 3: Emisi GRK tidak langsung dari transportasi	
Transportasi dan distribusi hulu	0
Perjalanan dinas	7
Transportasi dari klien dan pengunjung	0
Transportasi dan distribusi hilir	0
Perjalanan Karyawan	0
Kategori 4: Emisi GRK tidak langsung dari produk yang digunakan oleh perusahaan	
Kegiatan yang berhubungan dengan energi yang tidak termasuk dalam emisi langsung dan emisi energi tidak langsung	0
Pembelian Barang dan Jasa	0
Capital equipment/goods	0
Limbah yang dihasilkan dalam kegiatan operasional	0
Aset Sewaan hulu	0
Kategori 5: Emisi GRK tidak langsung yang terkait dengan penggunaan produk dari perusahaan	
Investasi	0
Penggunaan produk yang dijual	0
Perawatan akhir masa pakai produk yang dijual	0
Waralaba hilir	0
Aset Sewaan Hilir	0
Pengolahan produk yang dijual	0

Kategori 6: Emisi GRK tidak langsung dari sumber lainnya	
Emisi atau pembuangan tidak langsung lainnya	0
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 3)	7
Total Emisi GRK (Scope 1 and 2)	23.251,5
Total Emisi GRK (Scope 1, 2 and 3)	23.258,5
Offsets/Credits	0
Pembelian Renewable Energy Certificate (REC) (kWh)	0

E-02	**Intensitas Emisi GRK**	Total emisi dari Scope 1 dan 2 per unit pendapatan Perusahaan Tercatat	0
E-03	**Konsumsi Energi listrik**	Jumlah total energi yang dikonsumsi secara langsung (kWh or J)	88.298,06
		Jumlah total energi yang dikonsumsi secara tidak langsung (kWh or J))	0
		Total konsumsi energi (kWh or J)	88.298,06
E-04	**Konsumsi Air**	Total konsumsi air (m3)	30.314
E-05	**Limbah yang dihasilkan**	Total limbah yang dihasilkan (ton)	514,48

E-06 Komitmen Perusahaan untuk mencapai target Net Zero Emission	
Apakah Perusahaan memiliki komitmen pencapaian target net zero?	Ya
Tahun berapa Perusahaan menargetkan pencapaian Net Zero emission yang dipublikasi?	2060
Mohon berikan deskripsi ringkas penjelasan dan tautan ke dokumentasi yang menjelaskan komitmen pencapaian target Net zero emission Perusahaan.	
KMI berkomitmen mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) melalui penerapan strategi dekarbonisasi yang dilakukan secara bertahap dan terukur. Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah mengimplementasikan berbagai inisiatif pengurangan emisi gas rumah kaca, antara lain melalui optimalisasi kinerja peralatan dengan pemeliharaan berkala, penggunaan teknologi yang lebih efisien, serta pengendalian emisi kendaraan operasional melalui uji emisi rutin guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Selain itu, KMI melakukan pengendalian emisi dari sumber tidak bergerak melalui uji emisi cerobong pada genset dan fasilitas produksi untuk memastikan emisi berada di bawah baku mutu yang ditetapkan. Perusahaan juga melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai upaya peningkatan penyerapan karbon dan pengurangan jejak karbon secara berkelanjutan.	

E-07 Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (Emission Reduction)	
Apakah Perusahaan memiliki komitmen mengurangi emisi?	Ya
Target pengurangan emisi GRK	0,8399999737739563 %
	0 (tCO2e)
Tahun target untuk penurunan emisi GRK?	2060

Apakah perusahaan memiliki manajemen yang mengawasi pengendalian iklim?

Ya

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan penurunan emisi yang telah dicapai dibandingkan tahun sebelumnya.

Penjelasan:

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam mendukung pengendalian perubahan iklim, KMI terus mendorong upaya pengurangan atau reduksi emisi GRK. Komitmen ini juga sejalan dengan dukungan Perusahaan terhadap upaya Pemerintah dalam mencapai Emisi Nol Bersih tahun 2060 serta kontribusi terhadap pencapaian SDGs. Sepanjang tahun 2025, upaya pengurangan emisi GRK yang dilakukan Perusahaan meliputi:
1. Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta melakukan pemeliharaan secara berkala;
2. Melakukan pemeliharaan seluruh kendaraan operasional;
3. Melakukan uji emisi kendaraan operasional;
4. Melakukan uji emisi cerobong genset dan beberapa cerobong terkait proses produksi; serta
5. Melakukan penanaman pohon sehingga meningkatkan penyerapan karbon.

Sepanjang tahun 2025, KMI telah mencatatkan pencapaian pengurangan emisi sebesar 0,84 persen sebagai bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim yang dilakukan secara bertahap dan terukur. Dalam mendukung implementasi pengelolaan emisi tersebut, Perusahaan juga telah memiliki struktur pengawasan yang memadai melalui penunjukan Environmental Management Representative, yang diberikan wewenang oleh Presiden Direktur untuk mengoordinasikan seluruh tim manajemen dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Lingkungan. Keberadaan fungsi ini memastikan bahwa upaya pengendalian emisi dan pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara terintegrasi, efektif, dan sesuai dengan kebijakan serta standar yang berlaku.

B. Kinerja Sosial (Social Performance)

S-01 Kesetaraan Gender

Level Jabatan	Laki-Laki		Perempuan	
	Jumlah pegawai	Persentasi pegawai	Jumlah pegawai	Persentasi pegawai
Entry-level	622	65,2 %	4	0,42 %
Mid-level	191	20,02 %	33	3,46 %
Senior-level	52	5,45 %	7	0,73 %
Executive-level	44	4,61 %	12	0,1 %
Total Pegawai	909	95,28 %	56	4,72 %

S-02 Jumlah level pegawai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur

Rentang Usia (tahun)	Level Jabatan								Jumlah Pegawai
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
18-25	210	1	41	8	0	0	0	0	260
25-35	266	1	70	21	9	4	3	1	375
35-45	65	1	27	3	10	0	6	4	116
45-55	66	1	40	0	26	1	19	3	120
>55	15	0	13	1	7	2	16	4	58

S-03 Tingkat Pergantian Pegawai

	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan)
Jumlah Pegawai resign/Pemutusan Hubungan Kerja	185 Pegawai	19,2 %
Jumlah Pegawai Baru/pengganti	108 Pegawai	11,2 %

S-04 Jumlah Pegawai Sementara

	Jumlah Pegawai (dalam tahun pelaporan)	Percentage Pegawai (dalam tahun pelaporan)
Jumlah Pegawai perusahaan yang dipegang oleh kontraktor dan/atau konsultan	0 Pegawai	0 %

S-05 Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Rata-rata jam pelatihan per pegawai dalam tahun Pelaporan	Jumlah pegawai yang ikut serta dalam program pelatihan	Persentase jumlah pegawai yang ikut serta dalam pelatihan (%)
12,6 jam/pegawai	350	36 %

S-06 Jumlah Kecelakaan Kerja

Frekuensi kecelakaan kerja dari total pegawai	Persentase kecelakaan kerja serius yang berakibat cedera serius dan fatal dari total pegawai (%)
12	0 %

S-07 Jumlah Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam tahun Pelaporan	0

Kebijakan Perusahaan terkait Pekerja

S-08 Perusahaan memiliki kebijakan terkait pelecehan seksual dan/atau non-diskriminasi?	Ya

KMI memiliki kebijakan terkait pelecehan seksual dan non-diskriminasi sebagai bagian dari komitmen dalam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perusahaan menolak segala bentuk pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan di lingkungan kerja. Kebijakan ini memastikan bahwa seluruh karyawan dan mitra kerja memperoleh perlakuan yang adil tanpa memandang gender, usia, agama, maupun latar belakang lainnya, serta memiliki akses yang setara terhadap peluang pengembangan karier, peningkatan kompetensi, dan partisipasi dalam program perusahaan. Penerapan kebijakan ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang profesional, aman, dan harmonis.

S-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak asasi manusia?	Ya

KMI memiliki kebijakan terkait Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi bagian dari komitmen Perusahaan dalam menjunjung tinggi prinsip keberagaman, kesetaraan, dan perlindungan hak dasar karyawan.

Perusahaan menolak segala bentuk pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan di lingkungan kerja. KMI juga menjamin kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat bagi seluruh karyawan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dasar tenaga kerja. Dalam mendukung hubungan industrial yang harmonis, Perusahaan memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun melalui perundingan dengan serikat pekerja dan mengatur syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Seluruh karyawan tetap (100%) telah tercakup dalam PKB, sehingga hak-hak karyawan terlindungi secara adil dan transparan.

S-10 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pekerja anak dan/atau pekerja paksa?	Ya
KMI memiliki kebijakan yang melarang praktik pekerja anak dan kerja paksa dalam seluruh kegiatan operasional maupun rantai nilai Perusahaan. Komitmen ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Konvensi ILO Tahun 1957 mengenai Penghapusan Kerja Paksa. Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Perusahaan secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemasok dan mitra kerja guna memastikan tidak terdapat praktik pekerja anak maupun kerja paksa dalam rantai pasok.	
S-11 Perusahaan memiliki kebijakan perusahaan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan kerja yang aman dan layak diberikan kepada seluruh karyawan?	Ya
KMI memiliki kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta penyediaan lingkungan kerja yang aman dan layak bagi seluruh karyawan. Perusahaan berkomitmen untuk mengintegrasikan aspek K3 dalam seluruh aktivitas operasional sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, dengan target mencapai zero accident dan mencegah penyakit akibat kerja. Dalam implementasinya, KMI menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, sebagai pendekatan sistematis dalam mengendalikan risiko kerja. Selain itu, Perusahaan juga mengadopsi standar internasional ISO 45001:2018 yang diperbarui secara berkala untuk memastikan efektivitas pengelolaan K3. Penerapan kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, efisien, dan produktif bagi seluruh karyawan	

Corporate Social Responsibility (CSR)

S-12 Perusahaan memiliki aktivitas CSR, investasi atau sumbangan terhadap komunitas atau organisasi nirlaba terdaftar?	Ya
Selama tahun 2025, KMI melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dengan total realisasi dana sebesar Rp289,97 juta. Program CSR tersebut difokuskan pada bidang kesehatan, sosial, dan lingkungan sebagai bentuk kontribusi Perusahaan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan.	

C. Kinerja Tata Kelola (Governance Performance)

G-01 Keberagaman Manajemen dan Independensi (Board Diversity and Independence)

Tipe Manajemen Perusahaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Pihak Independen
Komisaris	0	2	2	2
Direksi	0	4	0	0

G-02 Total kehadiran direksi dan komisaris ke rapat dewan

	Jumlah rapat dewan (di tahun pelaporan)	Rata-rata persentase kehadiran direksi/komisaris dalam rapat dewan
Jumlah kehadiran direksi ke rapat dewan	16	100 %
Jumlah kehadiran komisaris ke rapat dewan	10	100 %

Kebijakan mengenai manajemen lainnya

G-03 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pemisahan Chairman of The Board dan CEO?	Ya

KMI menerapkan pemisahan fungsi antara Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan profesional, termasuk dalam mengawasi pelaksanaan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi, dengan dukungan Komite Audit. Sementara itu, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan, termasuk penetapan arah strategis, pelaksanaan operasional, serta pencapaian kinerja Perusahaan secara menyeluruh. Pemisahan peran ini memastikan adanya mekanisme check and balance yang efektif dalam tata kelola Perusahaan, sehingga pengelolaan dan pengawasan dapat berjalan secara optimal, transparan, dan akuntabel. Pemisahan fungsi antara Dewan Komisaris dan Direksi juga diuraikan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing.

G-04 Perusahaan memiliki kebijakan penilaian dewan direksi dan komisaris	Ya

Penilaian kinerja Direksi dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Penilaian ini menggunakan indikator kinerja utama yang mencakup pencapaian target perusahaan, kinerja operasional, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan. Selain itu, Direksi juga melakukan penilaian mandiri yang meliputi evaluasi kinerja kolektif dan individual masing-masing Direktur.

Sementara itu, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara periodik melalui dua mekanisme, yaitu penilaian mandiri oleh Dewan Komisaris dan penilaian oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian mandiri mengacu pada indikator seperti efektivitas fungsi pengawasan, kualitas pemberian nasihat kepada Direksi, tingkat kehadiran dan partisipasi dalam rapat, pemahaman terhadap kondisi bisnis, serta kontribusi terhadap penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Adapun penilaian oleh Pemegang Saham dilakukan melalui evaluasi atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dalam RUPS, yang mencakup efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, kualitas rekomendasi kepada Direksi, serta pelaksanaan tugas sesuai Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

G-05 Perusahaan memiliki kebijakan pelatihan dewan direksi dan komisaris	Ya

Kebijakan pengembangan kompetensi bagi Direksi mencakup partisipasi dalam pelatihan, seminar, serta forum diskusi yang mendukung peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis. Pada tahun 2025, pengembangan kompetensi Direksi dilakukan antara lain melalui diskusi dalam rapat bersama Dewan Komisaris serta pemantauan dan studi terhadap praktik terbaik di industri.

Sementara itu, Kebijakan pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris mencakup berbagai program pendidikan, pelatihan, kursus, dan seminar yang relevan dengan fungsi pengawasan dan perkembangan bisnis Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, peningkatan kompetensi Dewan Komisaris juga dilakukan melalui diskusi bersama Direksi serta pemantauan dan pembelajaran atas praktik terbaik industri

G-06 Kriteria khusus yang digunakan untuk pemilihan dewan direksi dan komisaris	Ya

KMI memiliki kriteria khusus dalam pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mengacu pada kebijakan internal Perusahaan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Anggaran Dasar Perusahaan.
Pelaksanaan fungsi nominasi saat ini dijalankan oleh Dewan Komisaris secara langsung dengan tetap mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kriteria yang digunakan dalam proses seleksi meliputi integritas, kompetensi, pengalaman, reputasi, serta kesesuaian dengan kebutuhan dan strategi Perusahaan. Selain itu, calon anggota juga wajib memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan, tidak memiliki catatan hukum tertentu, serta memenuhi ketentuan independensi (khususnya bagi Komisaris Independen).
Sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perusahaan menyampaikan informasi yang lengkap dan memadai mengenai profil calon kepada Pemegang Saham, termasuk riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan informasi relevan lainnya. Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kualifikasi calon dan memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham untuk ditetapkan melalui keputusan RUPS.

Kriteria pemilihan ulang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, integritas, serta kontribusi anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pencapaian kinerja dan penerapan tata kelola Perusahaan. Penetapan kembali jabatan dilakukan melalui mekanisme RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G-07 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kode etik dan/atau anti-korupsi?	Ya

KMI memiliki kebijakan terkait Kode Etik serta anti-korupsi, anti-penyuapan, dan gratifikasi sebagai bagian dari komitmen dalam membangun budaya integritas dan etika kerja yang tinggi. Kode Etik berlaku bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, serta pihak ketiga yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan, dan menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dan aktivitas usaha. Perusahaan juga menetapkan Kebijakan Anti Korupsi, Anti Penyuapan, dan Gratifikasi secara khusus dengan menerbitkan Surat Edaran Direktur Nomor 021/DIR-PD/I/2020 yang menegaskan komitmen Direksi dalam membangun budaya Perusahaan yang bebas dari korupsi dan fraud (Zero Tolerance).

Kode etik KMI dapat diakses pada situs website Perusahaan: https://kmi.co.id/index.php/investor/governance/code-of-conduct

G-08 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlakuan adil terhadap Pemegang Saham?	Ya

KMI memiliki kebijakan yang menjamin perlakuan adil terhadap seluruh Pemegang Saham, termasuk dalam keterbukaan dan akses informasi yang setara. Perusahaan memastikan penyampaian informasi dilakukan secara transparan, tepat waktu, dan tidak diskriminatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan informasi dilakukan secara hati-hati dengan pembatasan akses terhadap informasi material dan/atau rahasia hanya kepada pihak yang berwenang, guna menjaga kerahasiaan serta mencegah penyalahgunaan informasi.
Selain itu, Perusahaan secara tegas melarang Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan untuk memanfaatkan informasi material yang belum tersedia untuk publik (insider information) guna memperoleh keuntungan pribadi maupun pihak lain, termasuk dalam praktik insider trading. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan dalam menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan seluruh Pemegang Saham secara adil.

G-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kewajiban direksi/komisaris untuk mencegah adanya konflik kepentingan?	Ya

KMI memiliki kebijakan yang mewajibkan Direksi dan Dewan Komisaris untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, dan mengutamakan kepentingan Perusahaan.Dalam implementasinya, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan pemegang saham pengendali, sesama Direksi, maupun Dewan Komisaris, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang independen. Perusahaan juga mewajibkan pengungkapan potensi konflik kepentingan serta melarang anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memiliki benturan kepentingan. Selain itu, Komisaris Independen berperan aktif dalam mengawasi penerapan prinsip independensi dan memastikan setiap keputusan strategis diambil secara objektif serta mengutamakan kepentingan terbaik Perusahaan.

D. Lain-lain

Keselarasan Laporan Keberlanjutan/Tahunan dengan Metrik ESG

Kinerja	Kode	Nama Metrik	Halaman di Laporan Keberlanjutan/Tahunan
Lingkungan	E-01	Laporan Emisi Gas Rumah Kaca	217-219
	E-02	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	217-219
	E-03	Konsumsi Energi Listrik	214-215
	E-04	Konsumsi Air	216
	E-05	Limbah yang Dihasilkan	220-224
	E-06	Komitmen Perusahaan untuk Mencapai Target Net Zero Emission	211-212
	E-07	Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca	210-217-219
Sosial	S-01	Kesetaraan Gender	74-76
	S-02	Pegawai Berdasarkan Gender dan Kelompok Umur	76
	S-03	Tingkat Pergantian Pegawai	227
	S-04	Jumlah Pegawai Sementara	76
	S-05	Pelatihan dan Pengembangan Pegawai	77-79
	S-06	Jumlah Kecelakaan Kerja	235
	S-07	Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia	226
	S-08	Kebijakan Pelecehan Seksual dan/atau Non-diskriminasi	226
	S-09	Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia	226
	S-10	Kebijakan Pekerja Anak dan/atau Pekerja Paksa	226
	S-11	Kebijakan Mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan Kerja yang Aman dan Layak diberikan Kepada Seluruh Karyawan	231-232
	S-12	Pencegahan Konflik Kepentingan	235-240

Tata-kelola	G-01	Keberagaman Manajemen dan Independensi	151-136-144
	G-02	Total Kehadiran Direksi dan Komisaris ke Rapat Dewan	141-149
	G-03	Kebijakan Pemisahan Chairman of the Board dan CEO	129-137-146
	G-04	Kebijakan Penilaian Dewan Direksi dan Komisaris	142-150
	G-05	Kebijakan Pelatihan Dewan Direksi dan Komisaris	142-149
	G-06	Kriteria Khusus Pemilihan Dewan	152
	G-07	Kode Etik dan/atau Anti-Korupsi	180-183
	G-08	Kebijakan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham	188
	G-09	Pencegahan Konflik Kepentingan	136-144

Standar Internasional yang Diacu dan Verifikasi Pihak Ketiga

Keselarasan dengan kerangka pelaporan keberlanjutan

[X] Ya [ ] Tidak

- [X] GRI
- [ ] TCFD
- [ ] CDP
- [ ] IFRS S1
- [ ] IFRS S2
- [ ] SASB
- [X] Others, please specify

Pedoman pokok penyusunan Laporan Tahunan Terintegrasi Tahun 2025 mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29.POJK.04.2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; POJK No. 51.POJK. 03.2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; Indeks Global Reporting Initiative Standards, di mana Perusahaan telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks isi GRI untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 dengan merujuk kepada GRI Standards; dan Pedoman lainnya yang relevan.

Assurance dan validasi pihak ketiga

[X] Tidak

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

KMI Wire and Cable Tbk

Made Yudana

Corporate Secretary

KMI Wire and Cable Tbk

Jl. Raya Bekasi KM 23,1 Cakung Jakarta Timur 13910 Telp. 021-4601733 Fax. 021-

Telepon : 021-4601733, Fax : -, www.kmi.co.id

Nama Pengirim	Made Yudana
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	30-04-2026 18:58
Lampiran	1. IR KBLI 2025- Fin.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi KMI Wire and Cable Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. KMI Wire and Cable Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	08/CS/KMI/IV/2026
Issuer Name	KMI Wire and Cable Tbk
Issuer Code	KBLI
Attachment	1
Subject	Submission of Annual And Sustainability Report

The Company hereby submit Annual And Sustainability Report Report 2025 for the period of 01 Januari 2025 to 31 Desember 2025 in Indonesia

Will the Company be/has summons for the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes)

The Company made invitations to the Annual General Meeting of Shareholders on 10 Juni 2025

The information referred above has been published on the Company's website https://kmi.co.id/index.php/investor/disclosure at 19 Mei 2025

Is the Company listed on another Stock Exchange? (No)

A. Environmental Performance

The Company submits its Annual Sustainability and ESG Report:

E-01 Greenhouse Gas (GHG) Emission Report	
Consolidated GHG Emission Report?	Yes
Organizational Boundaries	Operasional/Finansial
Any subsidiaries that are not included in the report?	Yes
Please Explain: PT KMI Electric Solution & PT Langgeng Bajapratama	

Name	Total emission (tCO2e)
Category 1: Direct GHG emissions and removals	
Direct emissions from stationary combustion	0
Direct emissions from mobile combustion	1.912,8
Direct emissions from processes	0
Direct fugitive emissions	0
Direct emissions from Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)	0
Total Direct Emissions (Scope 1)	1.912,8
Category 2: Indirect GHG emissions from imported energy	

Indirect emissions from imported/purchased electricity consumption	21.338,7
Indirect emissions from imported/purchased network energy consumption (excluding electricity)	0
Total Indirect Emissions (Scope 2)	21.338,7
Category 3: Indirect GHG emissions from transportation	
Upstream transport and distribution	0
Business travels	7
Transportation of clients and visitors	0
Downstream transportation and distribution	0
Employee commuting	0
Category 4: Indirect GHG emissions from products used by Organization	
Energy related activities not included in direct emissions and energy indirect emissions	0
Purchased goods and services	0
Capital equipment/goods	0
Waste generated in operations	0
Upstream leased assets	0
Category 5: Indirect GHG Emissions associated with the use of products from the Organization	
Investments	0
Use of sold products	0
End of life treatment of sold products	0
Downstream franchises	0
Downstream leased assets	0
Processing of sold products	0
Category 6: Indirect GHG emissions from other sources	

Other indirect emissions or removals	0
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2)	7
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2)	23.251,5
Total GHG Emissions (Scope 1, 2 and 3)	23.258,5
Offsets/Credits	0
REC Purchases (kWh)	0

E-02	**GHG Emissions Intensity**	Total scope 1 and 2 emissions produced per revenue of listed compant (tCO2e/Rp)	0
E-03	**Electricity Consumption**	Total amount of energy directly consumed (kWh or J)	88.298,06
		Total amount of energy indirectly consumed (kWh or J)	0
		Total energy consumption (kWh or J)	88.298,06
E-04	**Water Consumption**	Total water consumed (m3)	30.314
E-05	**Waste Generation**	Total waste generated (ton)	514,48

E-06 Company commitment to Net Zero Emission Target	
Does the Company have a net zero emission target commitment?	Yes
What year is the Company's net zero emission published target?	2060
Please provide a brief description and a link to documentation explaining the Company's commitment in achieving net zero emission target.	
KMI is committed to supporting the achievement of Net Zero Emissions (NZE) through the implementation of a gradual and measured decarbonization strategy. Throughout 2025, the Company has implemented various greenhouse gas emission reduction initiatives, including optimizing equipment performance through regular maintenance, utilizing more efficient technology, and controlling operational vehicle emissions through routine emission testing to ensure compliance with environmental standards. In addition, KMI controls emissions from stationary sources through stack emission testing on generator sets and production facilities to ensure emissions are below established quality standards. The Company also carries out tree planting activities as an effort to increase carbon sequestration and reduce its carbon footprint sustainably.	

E-07 Company Commitment to GHG Emission Reduction Target	
Does the Company commit to reducing GHG emission?	Ya
What is the Company's GHG emission reduction target?	0,8399999737739563 %
	0 (tCO2e)
Targeted year in achieving GHG reduction target?	2060

Does the Listed Company has measures on monitoring in enacting climate policy?

Yes

Steps that have been taken and emission reductions that have been achieved compared to the previous year

As part of the Company's commitment to supporting climate change mitigation, KMI continues to encourage efforts to reduce GHG emissions. This commitment aligns with the Company's support for the Government's efforts to achieve Net Zero Emissions by 2060 and its contribution to the achievement of the SDGs. Throughout 2025, the Company's GHG emission reduction efforts include:
1. Implementing appropriate and environmentally friendly technology and conducting regular maintenance;
2. Maintaining all operational vehicles;
3. Conducting emissions testing on operational vehicles;
4. Conducting emissions testing on generator stacks and several stacks related to the production process; and
5. Planting trees to increase carbon sequestration.

Throughout 2025, KMI achieved a 0.84 percent emission reduction as part of its gradual and measurable climate change mitigation efforts. To support the implementation of this emissions management, the Company also has an adequate oversight structure through the appointment of an Environmental Management Representative, who is authorized by the President Director to coordinate the entire management team in implementing activities related to the Environmental Management System. The existence of this function ensures that emission control and environmental management efforts can be carried out in an integrated, effective manner, and in accordance with applicable policies and standards.

B. Kinerja Sosial (Social Performance)

S-01 Gender Diversity

Job positions	Men		Women	
	Number of employees	Percentage of employees	Number of employees	Percentage of employees
Entry-level	622	65,2 %	4	0,42 %
Mid-level	191	20,02 %	33	3,46 %
Senior-level	52	5,45 %	7	0,73 %
Executive-level	44	4,61 %	12	0,1 %
Total Pegawai	909	95,28 %	56	4,72 %

S-02 Employees Level by Gender and Age Group

Age group (years)	Job levels								Number of employees
	Entry-level		Mid-level		Senior-level		Executive-level		
	Men	Women	Men	Women	Men	Women	Men	Women	
18-25	210	1	41	8	0	0	0	0	260
25-35	266	1	70	21	9	4	3	1	375
35-45	65	1	27	0	10	0	6	4	116
45-55	66	1	40	0	26	1	19	3	120
>55	15	0	13	1	7	2	16	4	58

S-03 Employees Turnover

	Number of employees (in reporting year)	Percentage (in reporting year)
Number of employees resigned	185 Employees	19,2 %
Number of newly appointed Employees	108 Employees	11,2 %

S-04 Temporary Worker

	Number of employees (in reporting year)	Percentage (in reporting year)
Total company headcount held by contractors and/or consultants	0 Employees	0 %

S-05 Employee Training and Development

Average training hour per employee (in reporting year)	Total employee attending company training program	Percentage of employee attending company training program (%)
12,6 hours/employee	350	36 %

S-06 Injury Rate

Frequency of work-related accidents of total Employees (in reporting year)	Percentage of serious work-related accidents resulting in serious and fatal injuries from total employees (%)
12	0 %

S-07 Incidents Regarding Human Rights Abuse

Number of incidents regarding human rights abuse (in reporting year)	0

Company Policy Regarding Employees

S-08 Does the company has a policy regarding sexual harassment and/or non-discrimination?	Yes
KMI has a policy regarding sexual harassment and non-discrimination as part of its commitment to upholding the principles of equality, inclusivity, and respect for human rights. The company rejects all forms of harassment, discrimination, and violence in the workplace. This policy ensures that all employees and partners receive fair treatment regardless of gender, age, religion, or other background, and have equal access to career development opportunities, competency enhancement, and participation in company programs. The implementation of this policy supports the creation of a professional, safe, and harmonious work environment.	
S-09 Does the company has a policy regarding human rights?	Yes
KMI has a Human Rights (HAM) policy that is part of the Company's commitment to upholding the principles of diversity, equality, and protection of employees' basic rights. The Company rejects all forms of harassment, discrimination, and violence in the workplace. KMI also guarantees freedom of association and expression for all employees as a form of respect for basic labor rights. In supporting harmonious industrial	

relations, the Company has a Collective Labor Agreement (CLA) that is drafted through negotiations with labor unions and regulates work conditions as well as the rights and obligations of both parties. All permanent employees (100%) are covered by the CLA, so that employee rights are protected fairly and transparently.

S-10 Does the company have a policy regarding child labor and/or forced labor?	Yes

KMI has a policy prohibiting child labor and forced labor in all operational activities and the Company's value chain. This commitment aligns with applicable laws and regulations, including Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and the 1957 ILO Convention on the Abolition of Forced Labor. As part of implementing this policy, the Company regularly monitors its suppliers and partners to ensure that there are no child labor or forced labor practices in the supply chain.

S-11 Does the company have a company policy regarding occupational health and safety as well as a safe working environment for all employees?	Yes

KMI has a policy related to occupational health and safety (OHS) and the provision of a safe and decent work environment for all employees. The company is committed to integrating OHS aspects into all operational activities as part of its social responsibility and sustainability, with the target of achieving zero accidents and preventing occupational diseases. In its implementation, KMI applies the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) which refers to Government Regulation No. 50 of 2012, as a systematic approach in controlling occupational risks. In addition, the company also adopts the international standard ISO 45001:2018 which is updated regularly to ensure the effectiveness of OHS management. The implementation of this policy aims to create a safe, healthy, efficient, and productive work environment for all employees.

Corporate Social Responsibility (CSR)

S-12 Does the company have CSR activities, investments or donations to the community or registered non-profit organizations?	Yes

Throughout 2025, KMI implemented Corporate Social Responsibility (CSR) activities with a total realized fund of Rp289.97 million. These CSR programs focused on health, social, and environmental issues as a form of the Company's contribution to the community and stakeholders.

C. Governance Performance

G-01 Board Diversity and Independence

Type of Company Board	Number of seats on Company	Seats Occupied by Men	Seats Occupied by Women	Seats Occupied by Independent Party
Commissioners	0	2	2	2
Directors	0	4	0	0

G-02 Board Meeting Attendance

	Number of board meetings (in reporting year)	Percentage of board meeting attendances (in reporting year)
Director Attendance to Board Meetings	16	100 %
Comissioner Attendance to Board Meetings	10	100 %

Other governmental-related policy

G-03 Does the company has a policy regarding separation of the Chairman of the Board and CEO?	Yes

KMI implements a separation of functions between the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association. The Board of Commissioners carries out its supervisory function independently and professionally, including overseeing the implementation of strategies and policies established by the Board of Directors, with the support of the Audit Committee. Meanwhile, the Board of Directors is fully responsible for the management and administration of the Company, including determining strategic direction, operational implementation, and achieving the Company's overall performance. This separation of roles ensures an effective check and balance mechanism in the Company's governance, so that management and supervision can run optimally, transparently, and accountably. The separation of functions between the Board of Commissioners and the Board of Directors is also outlined in their respective duties and responsibilities.

G-04 Does the company has a policy regarding board appraisal?	Yes

The Board of Directors' performance is assessed annually by the Board of Commissioners to ensure the implementation of its duties and responsibilities in accordance with laws and regulations and the Articles of Association. This assessment utilizes key performance indicators covering the achievement of company targets, operational performance, and the implementation of corporate governance principles. In addition, the Board of Directors also conducts a self-assessment, which includes evaluating the collective and individual performance of each Director.

Meanwhile, the Board of Commissioners' performance is assessed periodically through two mechanisms: a self-assessment by the Board of Commissioners and an assessment by Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS). The self-assessment refers to indicators such as the effectiveness of the supervisory function, the quality of advice provided to the Board of Directors, attendance and participation in meetings, understanding of business conditions, and contribution to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. The Shareholder assessment is conducted through an evaluation of the Board of Commissioners' Supervisory Report at the GMS, which covers the effectiveness of the supervisory function, the quality of recommendations to the Board of Directors, and the implementation of duties in accordance with the Articles of Association and GMS resolutions.

G-05 Does the company has a policy regarding board training and development?	Yes

The competency development policy for the Board of Directors includes participation in training, seminars, and discussion forums that support leadership capacity building and strategic decision-making. In 2025, competency development for the Board of Directors will be conducted through discussions in joint meetings with the Board of Commissioners and monitoring and studying industry best practices.

Meanwhile, the competency development policy for the Board of Commissioners includes various educational programs, training, courses, and seminars relevant to the Company's oversight function and business development. Throughout 2025, competency development for the Board of Commissioners will also be conducted through discussions with the Board of Directors and monitoring and learning from industry best practices.

G-06 Does the company has a criteria regarding board appointment and re-election?	Yes

KMI has specific criteria for selecting members of the Board of Directors and Board of Commissioners, which refer to the Company's internal policies, Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 33/POJK. 04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and the Company's Articles of Association.
The nomination function is currently carried out directly by the Board of Commissioners, while prioritizing the principles of objectivity, transparency, and accountability. The selection process includes integrity, competence, experience, reputation, and suitability to the Company's needs and strategies. Furthermore, prospective members must meet fit and proper requirements, have no legal records, and meet independence requirements (particularly for Independent Commissioners).
Prior to the General Meeting of Shareholders (GMS), the Company provides complete and adequate information regarding the candidate's profile to Shareholders, including educational background, work experience, and other relevant information. The Board of Commissioners evaluates the candidate's qualifications and makes recommendations to Shareholders, which are then approved by a GMS resolution.

Re-election criteria are based on the evaluation of the performance, integrity, and contribution of members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the achievement of corporate governance and the implementation of good corporate governance. Re-appointment of positions is carried out through the GMS

mechanism in accordance with applicable provisions.	
G-07 Does the company has a policy regarding ethics and/or anti-corruption?	Yes
KMI has policies related to the Code of Ethics and anti-corruption, anti-bribery, and anti-gratification as part of its commitment to building a culture of integrity and high work ethics. The Code of Ethics applies to all Directors, Board of Commissioners, employees, and third parties working for and on behalf of the Company, and serves as a guideline for all decision-making and business activities. The Company also established a specific Anti-Corruption, Anti-Bribery, and Anti-Gratification Policy by issuing Director's Circular Letter No. 021/DIR-PD/I/2020, which affirms the Board of Directors' commitment to building a corporate culture free from corruption and fraud (Zero Tolerance). KMI's Code of Ethics can be accessed on the Company's website: https://kmi.co.id/index.php/investor/governance/code-of-conduct	
G-08 Does the company has a policy regarding equitable treatment of shareholders?	Yes
KMI has a policy that guarantees fair treatment for all Shareholders, including transparency and equal access to information. The Company ensures that information is disseminated transparently, timely, and non-discriminatory, in accordance with applicable laws and regulations. Information management is carried out carefully, with access to material and/or confidential information restricted to authorized parties to maintain confidentiality and prevent misuse. Furthermore, the Company strictly prohibits the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees from exploiting material information not yet available to the public (insider information) for personal gain or for the benefit of others, including through insider trading practices. This policy is part of the Company's commitment to maintaining market integrity and protecting the interests of all Shareholders fairly.	
G-09 Does the company have a policy regarding the obligations of directors/commissioners to prevent conflicts of interest?	Yes
KMI has a policy that requires the Board of Directors and the Board of Commissioners to prevent conflicts of interest by upholding the principles of independence, objectivity, and prioritizing the interests of the Company. In its implementation, all members of the Board of Directors have no family or financial relationships with controlling shareholders, fellow Directors, or the Board of Commissioners, thus supporting independent decision-making. The Company also requires disclosure of potential conflicts of interest and prohibits members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from being involved in decision-making that has a conflict of interest. In addition, Independent Commissioners play an active role in overseeing the implementation of the principle of independence and ensuring that every strategic decision is taken objectively and prioritizes the best interests of the Company.	

D. Other

Alignment of Sustainability/Annual Reports with ESG Metrics

Kinerja	Kode	Metric Name	Pages in the Sustainability/Annual Report
Environment	E-01	Greenhouse Gas Emission Report	217-219
	E-02	Greenhouse Gas Emission Intensity	217-219
	E-03	Electricity Consumption	214-215
	E-04	Water Consumption	216
	E-05	Waste Generated	220-224
	E-06	Company Commitment to Achieving Net Zero Emission Target	211-212
	E-07	Company Commitment to Reduce Emission	210-217-219
Social	S-01	Gender Equality	74-76
	S-02	Employees by Gender and Age Group	76
	S-03	Employee Turnover Rate	227
	S-04	Number of Temporary Officers	76
	S-05	Employee Training and Development	77-79
	S-06	Number of Work Accidents	235
	S-07	Human Rights Violation Incidents	226
	S-08	Sexual Harassment and/or Non-Discrimination Policy	226
	S-09	Policy on Human Rights	226
	S-10	Child Labor and/or Forced Labor Policy	226
	S-11	Occupational Health and Safety Policy and Safe and Secure Work Environment are provided to all employees.	231-232
	S-12	Corporate Social Responsibility	235-240

Governance	G-01	Management Diversity and Independence	151-136-144
	G-02	Total Attendance of Directors and Commissioners to Board Meetings	141-149
	G-03	Chairman of the Board and CEO Separation Policy	129-137-146
	G-04	Board of Directors and Commissioners Assessment Policy	142-150
	G-05	Board of Directors and Commissioners Training Policy	142-149
	G-06	Special Criteria for Election of the Board	152
	G-07	Code of Ethics and/or Anti-Corruption	180-183
	G-08	Fair Treatment Policy for Shareholders	188
	G-09	Conflict of Interest Prevention Policy	136-144

Referenced International Standards and Third Party Verification

Alignment with sustainability reporting framework

[X] Yes [ ] No

- [X] GRI
- [ ] TCFD
- [ ] CDP
- [ ] IFRS S1
- [ ] IFRS S2
- [ ] SASB
- [X] Others, please specify

Pedoman pokok penyusunan Laporan Tahunan Terintegrasi Tahun 2025 mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29.POJK. 04.2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; POJK No. 51.POJK.03.2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; Indeks Global Reporting Initiative Standards, di mana Perusahaan telah melaporkan informasi yang dikutip dalam indeks isi GRI untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 dengan merujuk kepada GRI Standards; dan Pedoman lainnya yang relevan.

Third-party assurance and/or validation

[X] No

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

KMI Wire and Cable Tbk

Made Yudana

Corporate Secretary

KMI Wire and Cable Tbk

Jl. Raya Bekasi KM 23,1 Cakung Jakarta Timur 13910 Telp. 021-4601733 Fax. 021-

Phone : 021-4601733, Fax : -, www.kmi.co.id

Sender Name	Made Yudana
Function	Corporate Secretary
Date and Time	30-04-2026 18:58
Attachment	1. IR KBLI 2025- Fin.pdf

This is an official document of KMI Wire and Cable Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. KMI Wire and Cable Tbk is fully responsible for the information contained within this document.